

Analisis implementasi kebijakan anti-bullying di SMK: Hambatan dan solusi

Miftakhul Huda Dwi Setiawan*, Muhammad Arya Sidiq, Yuda Hendriansyah, Arum Dwi Hastutiningsih

Departemen Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta

* Korespondensi (Email: miftakhulhuda.2022@student.uny.ac.id)

Abstract

This study analyzes the implementation of anti-bullying policies in Vocational High Schools (SMK), especially in identifying existing obstacles and solutions. The study employed a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews with guidance and counseling teachers and subject teachers. The results of the study indicate that although anti-bullying policies, such as the formation of the Violence Prevention Team (TPK), have been implemented effectively, there are significant obstacles, such as limited human resources and victims' reluctance to report. Additionally, the large number of students poses a challenge in monitoring bullying-related activities. Strategic solutions include collaboration with external parties, such as psychologists from health centers, as well as prevention programs through anti-bullying awareness activities since grade 10. This study concludes that the success of the policy is highly dependent on effective coordination among teachers, staff, students, and parents, although some challenges still need to be addressed.

Keywords: Anti-Bullying, Vocational School, Education Policy, Case Study, Bullying Prevention

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan anti-bullying di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya dalam mengidentifikasi hambatan dan solusi yang ada. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan anti-bullying, seperti pembentukan Tim Pencegahan Kekerasan (TPK), telah diterapkan secara efektif, terdapat hambatan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keengganan korban untuk melapor. Selain itu, jumlah siswa yang besar menjadi tantangan dalam memantau aktivitas terkait bullying. Solusi strategis meliputi kerjasama dengan pihak eksternal, seperti psikolog dari puskesmas, serta program pencegahan melalui kegiatan kesadaran anti-bullying sejak siswa kelas 10. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antara guru, staf, siswa, dan orang tua, meskipun beberapa tantangan masih perlu diatasi.

Kata kunci: Anti-Bullying, Smk, Kebijakan Pendidikan, Studi Kasus, Pencegahan Bullying.

How to cite: Setiawan, M. H. D., Sidiq, M. A., Hendriansyah, Y., & Hastutiningsih, A. D. (2024). Analisis implementasi kebijakan anti-bullying di SMK: Hambatan dan solusi. *Journal of Smart Education and Learning*, 1(3), 169–176. <https://doi.org/10.53088/jsel.v1i3.1381>



1. Pendahuluan

Bullying merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu jenjang yang sering menjadi sarang bullying (SMK) (Septiana, 2024). Bullying terjadi di lingkungan pendidikan tidak hanya ketika kekerasan fisik dilakukan secara langsung, tetapi juga ketika kekerasan verbal dalam bentuk apa pun, manipulasi psikologis, dan bahkan cyberbullying melalui media digital (Helmy et al., 2024). Fenomena ini sering terjadi tanpa disadari oleh orang tua, guru, atau sekolah, sehingga *bullying* dapat terus terjadi dan berubah menjadi budaya buruk yang merusak lingkungan belajar.

Siswa yang menjadi korban *bullying*, dalam bentuk apa pun akan mengalami dampak yang serius. Secara psikologis, korban *bullying* sering kali mengalami ketakutan, kecemasan, ketegangan yang berkepanjangan, dan bahkan depresi berat (Dahu, 2023). Secara sosial, korban sering kali menjadi penyendiri, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa sulit bergaul dengan teman sebayanya (Tampubolon, 2022). Korban mungkin mengalami masalah jangka panjang dalam kehidupan pribadi karena *bullying* ini, yang juga dapat mengganggu keterampilan sosial dan perkembangan kepribadian korban. Lebih jauh lagi, korban sering kali mengalami penurunan prestasi akademis, kehilangan minat belajar, dan bahkan dapat menyebabkan putus sekolah.

Bullying tidak hanya berdampak pada korban, namun berdampak negatif terhadap pelaku (Lusiana, 2022). Pelaku bullying sering kali menunjukkan perilaku agresif yang tidak sehat dalam kehidupan sosial maupun di lingkungan pendidikan. Jika tidak ditangani dengan tepat, perilaku ini dapat menimbulkan intoleransi dan kekerasan yang dapat berlanjut hingga dewasa (Surani et al., 2024). Selain itu, jika tindakan mereka tidak segera ditangani, pelaku berpotensi mengalami dampak sosial dan hukum. Sementara itu, siswa atau orang yang melihat *bullying* dapat merasa tidak nyaman, takut, dan dihadapkan pada dilema moral jika mereka tidak dapat mencegahnya. Hal ini memperburuk kecemasan sosial, yang dapat memperburuk suasana belajar di lingkungan sekolah.

Adanya perilaku bullying di sekolah kejuruan mengakibatkan lingkungan belajar yang tidak baik dan merugikan bagi mereka yang terlibat. *Bullying*, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, merusak tujuan utama sekolah untuk mendidik dan mengembangkan potensi anak-anak. Apa yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang dan belajar justru berubah menjadi lingkungan yang nyaman dan penuh tekanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat, orang tua, dan sekolah untuk bekerja sama mencegah dan mengatasi *bullying* guna menyediakan lingkungan belajar yang aman dan sehat yang meningkatkan kesejahteraan semua siswa (Widyaningtyas, 2023).

Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan anti-*bullying* untuk memerangi dan mencegah fenomena tersebut sebagai respons terhadap banyaknya kasus bullying di berbagai jenjang pendidikan. Permendikbudristek PPKSP Nomor 46 Tahun

2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, merupakan kebijakan yang digunakan sebagai payung hukum bagi seluruh warga sekolah. Peraturan ini digunakan sebagai dasar dalam menangani serta mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi, dan intoleransi. Peraturan tersebut mencakup proses penanganan dan rehabilitasi korban, konsekuensi bagi pelaku, dan langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan terjadinya *bullying*. Peraturan internal sekolah merupakan perwujudan dari peraturan nasional yang menjalankan kebijakan tersebut. Inisiatif ini menunjukkan dedikasi pemerintah untuk membina lingkungan belajar yang aman dan tanpa kekerasan sekaligus menegakkan hak siswa atas keselamatan yang layak selama pembelajaran.

Kebijakan anti-bullying yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang aman serta ramah (Widarningsih A., 2023). Menciptakan ruang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan baik psikologis maupun fisik sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Siswa yang merasa aman dapat berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran serta pertumbuhan pribadi mereka tanpa adanya khawatir diancam oleh teman sebaya atau pihak yang berada di sekolah. Lingkungan belajar yang nyaman dapat mendorong perkembangan hubungan sosial yang positif antara siswa, guru, serta seluruh warga sekolah (Hanipah A.D. et al., 2022).

Kebijakan ini perlu diterapkan secara konsisten di lapangan selain memiliki dukungan regulasi yang kuat agar dapat memenuhi tujuannya. Setiap sekolah perlu membuat strategi internal yang spesifik untuk kebutuhannya (Nurbawani, 2021). Beberapa contoh rencana tersebut meliputi pembentukan tim anti-*bullying*, pembuatan kurikulum pendidikan karakter, dan penyelenggaraan acara yang mempromosikan penerimaan dan toleransi terhadap keberagaman. Agar kebijakan ini efektif, semua anggota komunitas, siswa, staf, dan orang tua harus berpartisipasi secara aktif. Diharapkan kasus bullying dapat dikurangi dan iklim sekolah yang lebih ramah dan mendukung dapat dibangun untuk pertumbuhan semua anak melalui kerja sama antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat sekolah.

Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan anti-*bullying* yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, termasuk mengidentifikasi prosedur yang telah ditetapkan sekolah untuk menangani dan mencegah insiden *bullying*. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini dengan wawancara terhadap guru untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi kebijakan bullying di SMK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kebijakan anti-*bullying* telah diimplementasikan secara efektif di lingkungan SMK.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan anti-*bullying* di SMK. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena dalam

konteks yang spesifik, yaitu lingkungan SMK. Penelitian dilakukan di SMK yang telah menerapkan kebijakan anti-*bullying*, dengan subjek penelitian 2 responden meliputi guru BK dan guru mata pelajaran.

Instrumen penelitian terdiri dari wawancara, di mana wawancara dirancang untuk menggali pandangan responden mengenai *bullying* dan pelaksanaan kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mengenai insiden *bullying*. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yang meliputi transkripsi, koding, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema yang muncul (Faustyna, 2023). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi (Sarosa, 2021). Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan responden dan memastikan bahwa mereka memberikan persetujuan sebelum wawancara dilakukan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Setelah proses pengumpulan data melalui serangkaian wawancara mendalam dengan para responden selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membahas temuan dari responden 1 (guru bimbingan konseling) dan responden 2 (guru mata pelajaran bahasa jawa). Dalam wawancara ini, kami akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mereka mengenai fenomena *bullying* di lingkungan sekolah serta kebijakan yang diterapkan untuk mencegahnya.

Pandangan Tentang *Bullying*

Responden 1 dan responden 2 memiliki pemahaman yang serupa tentang *bullying* sebagai perilaku yang merugikan orang lain. Responden 1 mendefinisikan bahwa "*Bullying* sebagai perilaku yang dapat merugikan orang lain, seperti mengejek", sementara responden 2 lebih menekankan dampaknya, yaitu merendahkan seseorang hingga menyebabkan keterpurukan mental. Kedua responden setuju bahwa *bullying* dapat terjadi karena adanya individu yang merasa lebih dominan daripada yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada pemahaman umum mengenai *bullying* sebagai fenomena sosial yang merugikan dan dapat menyebabkan kerugian psikologis bagi korban.

Namun, responden 2 menambahkan bahwa "Di SMK tempat saya mengajar, kasus *bullying* besar tidak terlalu terlihat, dan yang ada hanyalah bentuk ejek-ejekan yang masih dalam batas wajar". Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai tingkat keparahan *bullying* di sekolah. Sementara responden 1 tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat keparahan *bullying*, ia menegaskan bahwa "*Bullying* pasti ada di mana-mana, terutama jika seseorang memiliki kebiasaan membully dari rumah".

Penyebab dan Tanggung Jawab

Kedua responden memiliki pandangan yang berbeda mengenai tanggung jawab dalam menangani kasus *bullying*. Responden 1 berpendapat bahwa "Tanggung jawab menangani *bullying* terletak pada sekolah dan orang tua, tetapi jika kasus sudah

masuk ke ranah hukum, tanggung jawab akan beralih ke pihak lain yang lebih berwenang". Ini menunjukkan bahwa responden 1 memandang penanganan *bullying* sebagai tanggung jawab kolektif antara sekolah, keluarga, dan institusi lain. Di sisi lain, responden 2 mengakui bahwa "Adanya tim anti kekerasan di sekolah, yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam menangani masalah ini, meskipun ia tidak mengetahui secara mendalam kebijakan anti-*bullying* di sekolah tersebut".

Pandangan ini memperlihatkan peran tim formal dalam menangani *bullying* di SMK. Akan tetapi, ada keterbatasan jumlah personel pada tim ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan anti-*bullying* di SMK tersebut. Dengan jumlah siswa yang mencapai 2.500 orang, tim bimbingan konseling yang hanya berjumlah 10 orang dan tim budaya yang berjumlah 8 orang masih belum mampu mengatasi permasalahan *bullying* secara menyeluruh.

Hambatan dan Efektivitas Implementasi

Hambatan yang diidentifikasi oleh kedua responden menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan anti-*bullying* di SMK. Responden 1 menyebutkan bahwa "Salah satu hambatan utama adalah ketakutan korban untuk melapor". Tekanan yang dirasakan oleh korban *bullying* dapat menghalangi mereka untuk melaporkan kejadian tersebut, sehingga kasus tidak terungkap dan tidak dapat ditangani dengan baik. Hambatan ini menyoroti pentingnya dukungan emosional bagi korban serta perlunya menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk berbicara. Responden 2 juga menyebutkan bahwa "Tantangan dalam jumlah siswa yang sangat banyak, yang membuat sulit bagi tim yang terbatas untuk memantau semua aktivitas yang berkaitan dengan *bullying*." Dengan kata lain, meskipun ada struktur dan tim yang bertugas menangani *bullying*, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan besar dalam efektivitas kebijakan ini.

Meski demikian, kedua responden sepakat bahwa kebijakan anti-*bullying* di sekolah mereka cukup efektif. Responden 1 menyoroti adanya beberapa tim seperti Tim Pencegahan Kekerasan (TPK) dan tim budaya yang berkolaborasi untuk menangani kasus *bullying*, yang menurutnya cukup efektif dalam menangani masalah tersebut. Responden 2 juga menilai kebijakan ini efektif, terutama karena komunikasi antar elemen sekolah berjalan dengan baik. Pentingnya komunikasi juga diangkat sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan anti-*bullying*, terutama dalam hal koordinasi antara tim anti kekerasan dan warga sekolah lainnya.

Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi

Responden 1 menjelaskan bahwa "Ketika ada laporan *bullying*, korban akan dipanggil untuk memberikan kronologi kejadian, dan pihak sekolah akan berkoordinasi dengan orang tua serta ketua kelas untuk memverifikasi laporan tersebut". Jika diperlukan, kasus tersebut akan dirujuk ke pihak yang lebih berwenang. Ini menunjukkan adanya mekanisme pelaporan formal yang melibatkan berbagai pihak dalam menangani kasus *bullying*.

Di sisi lain, responden 2 menyebutkan bahwa "Belum pernah ada kasus *bullying* yang serius di sekolah ini, sehingga belum ada pelaporan formal yang dibuat". Namun,

ia menambahkan bahwa jika terjadi *bullying*, sekolah telah memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang menjadi panduan dalam menangani kasus tersebut. Mekanisme evaluasi kebijakan anti-*bullying* yang disebutkan oleh kedua responden melibatkan peninjauan laporan kasus dan pemantauan progres korban setelah diberikan pendampingan, serta penilaian apakah korban sudah kembali normal dan tidak mengalami *bullying* lagi.

Peran Orang Tua dan Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Kedua responden sepakat bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan anti-*bullying*. Responden 1 menyatakan bahwa “Sekolah akan berkolaborasi dengan orang tua dalam menangani kasus *bullying*”, sementara responden 2 memberi gagasan bahwa “Setelah siswa keluar dari gerbang sekolah, tanggung jawab kembali ke orang tua”. Pandangan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Selain itu, kedua responden juga menyebutkan adanya kerjasama dengan pihak eksternal seperti psikolog dari puskesmas, yang membantu dalam menangani kasus *bullying*. Responden 1 menjelaskan bahwa “Pihak puskesmas akan mendampingi korban dalam program yang sedang berlangsung”, sementara responden 2 menambahkan bahwa “Kerjasama dengan puskesmas melibatkan *screening* kesehatan untuk siswa”.

Analisis ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-*bullying* di SMK yang diwakili oleh dua responden memiliki kekuatan dalam hal kolaborasi antara tim internal sekolah, orang tua, dan pihak eksternal. Namun, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan ketakutan korban untuk melapor. Meskipun demikian, kebijakan ini dianggap cukup efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung. Keterlibatan semua elemen sekolah, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua, sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan anti-*bullying* di SMK, dapat disimpulkan bahwa sekolah telah memiliki sistem penanganan *bullying* yang terstruktur melalui pembentukan Tim Pencegahan Kekerasan (TPK) dan tim budaya yang bekerja secara kolaboratif. Implementasi kebijakan anti-*bullying* di sekolah ini didukung oleh mekanisme pelaporan yang jelas, di mana setiap kasus ditangani melalui tahapan yang sistematis mulai dari pelaporan korban, verifikasi dengan berbagai pihak, hingga tindak lanjut yang melibatkan orang tua dan pihak eksternal jika diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan anti-*bullying* menghadapi beberapa hambatan signifikan. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana tim BK yang hanya berjumlah 10 orang dan tim budaya yang berjumlah 8 orang harus menangani sekitar 2.500 siswa. Selain itu, keengganan korban untuk melaporkan kejadian *bullying* karena tekanan psikologis juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan ini. Hambatan-hambatan tersebut

memengaruhi efektivitas pemantauan dan penanganan kasus *bullying* di lingkungan sekolah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah telah mengembangkan beberapa solusi strategis. Pertama, sekolah menerapkan sistem bertingkat dalam penanganan kasus, mulai dari pemberian surat peringatan hingga rujukan ke Balai Pelindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) untuk kasus yang lebih serius. Kedua, sekolah membangun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk psikolog dari puskesmas, untuk memberikan dukungan profesional dalam penanganan kasus *bullying*. Ketiga, sekolah mengembangkan program pencegahan melalui kegiatan kesamaptan dan pengenalan anti-*bullying* sejak siswa masuk di kelas 10.

Efektivitas implementasi kebijakan anti-*bullying* di sekolah ini didukung oleh komunikasi yang baik antar elemen sekolah dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Peran aktif dari guru, staf, siswa, dan terutama orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, kebijakan anti-*bullying* yang diterapkan telah berhasil menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Keberhasilan ini tercermin dari minimnya kasus *bullying* serius yang terjadi dan adanya sistem penanganan yang jelas ketika terjadi kasus *bullying*.

Untuk meningkatkan implementasi kebijakan anti-*bullying* di SMK, sekolah disarankan menambah sumber daya manusia, seperti relawan atau mahasiswa magang, serta meningkatkan kesadaran siswa melalui program penyuluhan dan mekanisme pelaporan anonim. Pelatihan berkelanjutan bagi guru, pemanfaatan teknologi untuk pelaporan dan pemantauan, serta penguatan kerjasama dengan pihak eksternal seperti psikolog dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga perlu dilakukan. Selain itu, program pencegahan *bullying* dapat diperluas dengan format yang kreatif, sementara evaluasi rutin kebijakan dan keterlibatan aktif orang tua melalui sesi parenting akan memastikan kebijakan berjalan lebih efektif. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif.

Referensi

- Dahu, M. G., & Karoba, H. A. M. (2023). Dampak Bullying Terhadap Keberlangsungan Generasi Muda. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 2024–2109. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i12.2080>
- Faustyna. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)*. umsu press.
- Hanani, H. A. R., & Yudistira, S. (2024). Kekerasan Mental (Bullying) sebagai Isu Kesehatan Masyarakat di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2512–2524. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.4579>
- Hanipah, A. D., Amalia, T. N., & Setiabudi, D. I. (2022). Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.51903/education.v2i1.148>

- Lusiana, S. N. E., & Arifin, S. (2022). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337–350. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>
- Nurbawani, A. (2021). Strategi Kepala Sekolah Dalam Pemasaran Jasa Pendidikan di Lembaga Pendidikan Baru Pada Era Marketing 4.0 (Studi Kasus di SMK BP Subulul Huda). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 52–73. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i1.41>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Septiana, A. A., & Khasan, M. (2024). Regulasi Diri pada Taruna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran. *Psikodimensia*, 23(1), 1–13. <https://doi.org/10.24167/psidim.v23i1.10709>
- Surani, D., Warih Handoyo, A., Zakiyyah, N., Hanifa Jauza, R., & Putri Damayanti, I. (2024). Seminar Pengenalan Dan Pemahaman 3 Dosa Besar Pendidikan Di Smks Arrasyadiyyah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 904–911. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1035>
- Tampubolon, M. A. (2022). *Gambaran kemampuan interaksi sosial pada remaja laki laki suku batak yang mengalami bullying*. Universitas HKBP Nommensen.
- Widarningsih, A. (2023). Strategy for Child Friendly School Policy Implementation in Bantul District. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(4), 8–21. <https://doi.org/10.21831/sakp.v12i4.19815>
- Widyaningtyas, R., & Mustofa, R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(01), 533–548. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5489>